

Berkata Konservasi, Bertindak Destruksi

Teuku Kemal Fasya

Pada mulanya segalanya adalah kata. Begitu kira-kira filsafat Ferdinand de Saussure pancang ketika mengonstruksikan peradaban pengetahuan tentang bahasa. Filsafat linguistik Saussurean ini berkembang menjadi ilmu pengetahuan kemudian hari, merambah pada semua rumpun ilmu: sosial, humaniora, dan alam.

Kata yang dipupuk akan berkembang menjadi kebudayaan. Akan tetapi kata yang kering-terasing tanpa aktualitas akan menjadi luka (*scar*). Luka yang dibiarkan akan menjadi parut (*scarcity*); sisi yang berlubang dan hampa – dalam perspektif Jacques Lacan disebut *manque à être*.

Begitu pula iklan sebagai produk linguistik. Iklan sesungguhnya hanya sebetuk persuasi, bahkan sejenis desepsi, penipuan belaka. Jika ada kebenaran dalam iklan wujudnya hanya mikroskopis dibandingkan kadar superfisialitasnya. Semua iklan menggambarkan segalanya secara berlebihan. Tidak ada yang seindah warna aslinya. Iklan politik apalagi. Penuh buih-buih fetisisme dan narsisisme.

Kata tak Nyata

Beberapa waktu lalu, harian ini mengangkat berita iklan, “Suadi – Nazar Komit Jadikan Lhokseumawe Kota Hijau” (*Serambi*, 17 Desember 2014). Disebutkan untuk memperingati Hari Menanam Pohon Nasional (HMPN) pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan aksi tanam ratusan ribu pohon. Ratusan ribu? Dimana pohonnya? Nyungsep ke dalam tanah?

Kalau yang tak tinggal di kota ini tentu merasa sejuk oleh iklan itu. Tapi yang hidup dan bekerja di kota ini tahu bahwa kenyataan berbeda dengan iklan. Lhokseumawe menjadi satu dari banyak kota di Aceh yang telah gersang oleh pohon kota. Pelebaran jalan protokol kota beberapa tahun lalu telah menebang banyak pohon kota. Banjir menjadi langganan kota ini. Bukan hanya masalah kontur tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut atau buruknya infrastruktur penangkal, tapi juga tak ada aksi nyata yang bisa menjadikan kota ini tak tenggelam secara konservatoris.

Satu-satunya oase keindahan kota adalah Taman Riyadhah, tapi itu pun dipapras ketika dilakukan renovasi. Alih-alih menjadi baik, proyek pembangunan itu malah terkesan asal-jadi dan meninggalkan destruksi ekologis. Ketika kita memerlukan lebih banyak kanopi alam untuk membantu warga kota mendapatkan kesejukan dan udara segar, kini tempat itu pun telah terbuka. Sinar matahari berpendar menyungut permukaan kulit pengendara kendaraan.

Keprihatinan saya semakin besar, jika nanti pun atas alasan pembangunan (atau kerakusan), dua-tiga pohon-pohon purba di Kutablang atau jejeran pohon-pohon yang ditanami pemerintah kabupaten Aceh Utara beberapa puluh tahun lalu, dari Blang Pulo hingga Panggoi harus hilang demi pelebaran jalan. Kita masih ingat, bagaimana dulu rerimbunan pohon dari Mesjid Panggoi hingga kompleks perumahan atas cukup menyejukkan. Kini pohon itu tak ada lagi demi jalan.

Bandingkan juga antara janji-janji Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf ketika kampanye pada Pilkada 2012 dan bukti yang bisa digariskan. Tiga di antara 21 janji tersebut adalah “menginventarisasi kekayaan dan sumber daya alam” dan “menata kembali sektor pertambangan”. Muara dari semua janji adalah “meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh”. Kata-kata itu semakin terluka jika diekstrapolasi dengan kenyataan tentang pengelolaan lingkungan.

Dalam berita iklan, “Pemantauan Kualitas Lingkungan” (*Serambi*, 19 Desember 2014) terlihat kerawanan lingkungan dan pencemaran yang sudah mengepung Aceh. Semua sungai utama di Aceh telah tercemar racun! Krueng Tamiang dan Danau Aneuk Laot telah tercemar berat. Adapun Krueng Peusangan, Krueng Sabee, Krueng Meureubo, dan Danau Lut Tawar tercemar sedang. Semua pencemaran disebabkan oleh limbah pabrikan industri, perkebunan, pertanian dan domestik.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah yang kita pilih secara demokratis tidak bisa menjaga faktor fundamental kehidupan, yaitu air. Penyebab polusi dan limbah memberikan kesimpulan bahwa, pemerintah terlalu lemah berhadapan dengan kuasa korporasi dan privatisasi bisnis. Mereka bisa didikte untuk pemenuhan insting ekonomika dan mengorbankan rakyat. Bagaimana kesejahteraan sosial bisa diwujudkan jika air yang sangat dekat dengan kehidupan tidak bisa dilindungi?

Nyatakan Kata!

Kini kita tersadar, alam yang seharusnya menjadi anugerah Tuhan paling besar, hari-demi-hari terus mengalami degradasi dan destruksi untuk alasan pembangunan. Konstruksi pembangunan yang mengurbankan lingkungan sebenarnya bukan khas Aceh, perilaku pemerintah pusat sama saja. Jika ada inisiatif-inisiatif berbeda di daerah lain di Indonesia, hal itu karena komitmen kuat

pemimpinnya atau kesadaran “teologi lingkungan” masyarakat yang telah merasuk hingga tulang sumsum.

Jika kini Surabaya telah menjadi kota subur, itu karena komitmen kuat dari Walikota Tri Rismaharini. Ia rela melakukan pelbagai upaya agar Surabaya bisa menjadi kota pesona hijau. Pekerjaan itu bukan baru dilakukan sejak menjabat walikota pada 2010 tapi sejak menjadi kepala dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Ketika ia diangkat menjadi kepala Bappeda Surabaya, ia mempertajam visi konservasi kota. Maka tak heran ketika ada aksi bagi-bagi es krim dari sebuah perusahaan makanan yang merusak taman kota, ia tak segan memaki dan meminta ganti rugi. Ia merasa alam dan taman itu bagian dari pancaran jiwanya.

Jika masyarakat pulau di Kabupaten Anambas melakukan aksi bersih-bersih laut setiap jumat pagi, tidak dibiayai anggaran pemerintah, itu karena mereka merasa laut itu sebagai ibu yang harus dijaga. Ibu jangan difitnah dengan sampah-sampah yang menggantung di tepian pantai dan geladak. Ambil sampah dan jadikan laut tetap suci dan indah!

Jika Walikota Bandung, Ridwan Kamil, menghidupkan taman-taman kota berbasis ekologis, ia menyadari itu sebagai upaya agar publik bisa hidup sehat, nyaman, dan bahagia. Kebahagiaan dan kenyamanan dari segarnya taman-taman kota secara tidak langsung memacu kreativitas dan kecerdasan publik. Masyarakat yang kreatif dan produktif adalah harta karun kota yang tidak bisa dinilai dengan uang. Masyarakat yang kreatif terhadap alam akan mendorong kultur konservasi sebagai “iman” sosial-ekonominya. Jika nanti, pengganti Ridwan Kamil adalah walikota destruktif, mereka sudah menjadi benteng sosial yang akan melawan segala upaya komersialisasi kota Bandung.

Jika kini pemerintah di Aceh tak kunjung mewujudkan kata konservasi di dalam kebijakannya, itu karena memang di alam bawah sadarnya tidak pernah kuatir atas kerusakan lingkungan. Alam bawah sadarnya bercampur hal-hal lain sehingga terhalang untuk berkomitmen penuh menyelamatkan lingkungan. Jika pun kata-kata itu ada dalam visi, misi, dan program, tak lain hanya cangkokan dari para cerdik-pandai yang berada di sekelilingnya atau dari daerah lain yang sudah melakukannya.

Jika pun pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa, paling tidak kita bisa melakukannya dengan tangan dan uang sendiri, baik aksi konservasi seperti menanam pohon di pekarangan atau lahan, atau melakukan advokasi jika nantinya pemerintah memang menjalankan kebijakan predatoris untuk semakin merusak bumi.

Teuku Kemal Fasya, pendidik.

Serambi Indonesia, 29 Desember 2014.